

Sinergi Perencanaan Anggaran Direktorat Standardisasi dalam Memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional untuk Mendukung SDGs Ke-17

Mutia Dewi Alifia Az Zahra¹, Ayzumi Illyah Khasanah², Eva Hany Farida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674318@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674118@mhs.unesa.ac.id²,
evafanida@unesa.ac.id³, meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 02 Mei 2026

Revised: 22 Juni 2026

Accepted: 05 Juli 2026

Keywords: *Perencanaan Anggaran, Infrastruktur Mutu Nasional, SDGs Ke-17, Standardisasi, Anggaran Berbasis Kinerja.*

Abstract: *Pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ke-17 memerlukan kapasitas kelembagaan yang kuat, salah satunya melalui Infrastruktur Mutu Nasional (IMN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas dan sinergi perencanaan anggaran pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dalam memperkuat IMN serta kontribusinya terhadap kemitraan global. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (library research), menggunakan data sekunder berupa Laporan Kinerja (LAPKIN) 2025 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat mencatatkan performa sangat positif dengan Indeks Kendali Mutu mencapai 75,59% (107,98% dari target) dan realisasi anggaran yang sangat efisien sebesar 99,58%. Sinergi anggaran terwujud melalui partisipasi aktif dalam forum internasional dan harmonisasi standar yang meningkatkan daya saing nasional. Namun, tantangan berupa program yang masih bersifat sektoral dan keterbatasan integrasi sistem informasi perlu diperkuat melalui mekanisme KRISNA dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kesimpulannya, sinergi perencanaan anggaran yang efektif bukan sekadar persoalan administratif, melainkan fondasi strategis dalam meningkatkan produktivitas nasional dan memenuhi komitmen pembangunan berkelanjutan global.*

PENDAHULUAN

Agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kerangka strategis global yang menuntut komitmen selektif lintas sektor. Di antara 17 tujuan yang telah ditetapkan, SDGs Ke-17 menekankan pentingnya kemitraan global sebagai prasyarat

untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan sarana implementasi yang memadai. Di Indonesia, penguatan kelembagaan standardisasi menjadi salah satu pilar penting yang berkontribusi untuk mencapai target tersebut (Hickmann, T. *et al.*, 2024).

Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) merupakan fondasi strategis bagi daya saing bangsa di pasar global. IMN yang terdiri dari standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi, berfungsi sebagai instrumen integrasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (BSN, 2023). Urgensi penguatan infrastruktur mutu semakin menguat seiring dengan capaian Indonesia di kancah internasional. Menurut penilaian lembaga konsultan global Independen Mesopartner & Analyticar dari Jerman pada Mei 2024, Indonesia menempati posisi ke-27 dari 185 negara dalam *Global Quality Infrastruktur Indeks* (GQII) dan menempati posisi pertama di anggota ASEAN (BSN, 2024). Capaian ini menggambarkan bahwa infrastruktur mutu memiliki dampak nyata. Standardisasi terbukti berpengaruh 21,2% dari pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan 14,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan peningkatan sebesar 1% dalam jumlah standar yang ditetapkan berkorelasi dengan peningkatan 0,6% dalam produktivitas tenaga kerja (BSN, 2024).

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan memegang peranan vital dalam ekosistem ini. Sebagai unit teknis utama, direktorat ini bertanggung jawab atas perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengendalian mutu. Keberhasilan fungsi ini memerlukan sinergi perencanaan anggaran agar setiap program kerja mampu memperkuat IMN secara nyata. Perencanaan anggaran terpadu tidak hanya mengoptimalkan sumber daya, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu juga mengambil peranan penting untuk mendukung misi dalam membangun sektor perdagangan tahun 2020-2025, yaitu meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri dan dalam negeri melalui penguatan penerapan standar dan persyaratan teknis yang didukung oleh perluasan kerja sama serta pertukaran informasi di bidang pengendalian mutu. Langkah strategis lainnya mencakup peningkatan kapasitas lembaga penilaian kesesuaian serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor terkait regulasi teknis. Seluruh rangkaian berpusat pada peningkatan kualitas layanan publik (Dit. Standalitu, 2025).

Berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2025 Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, total alokasi anggaran mencapai Rp15.886.000.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, salah satunya kegiatan partisipasi aktif dalam kerja sama internasional di bidang standardisasi dan pengendalian mutu, yang mencakup forum internasional seperti Hybrid Meeting Sidang JSC EEE 39. Kegiatan ini didukung oleh anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar lebih dari Rp162.000.000, serta komponen kegiatan kerja sama (base line) yang mencapai Rp562.000.000.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, isu transformasi ekonomi menyoroti bahwa penerapan standardisasi di Indonesia masih terbatas. Industrialisasi yang tepat memerlukan dukungan infrastruktur standardisasi pada industri prioritas. Oleh karena itu, perencanaan anggaran di tingkat direktorat harus selaras dengan kerangka kebijakan nasional yang lebih luas (BSN, 2024).

Perencanaan anggaran menjadi mekanisme utama dalam memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien di lembaga pemerintah. Dengan mengadopsi konsep *value for money* dan pengawasan kinerja *output* penganggaran dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem anggaran tradisional yang mencerminkan tujuan dan sasaran organisasi serta menyediakan informasi yang

menjadi dasar alokasi anggaran yang efektif. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) bertujuan memperkuat penganggaran berbasis kinerja agar dokumen anggaran lebih transparan dan akuntabel (Mais, R. G. et al., 2024). Dalam lembaga standardisasi, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu mencapai standar nasional yang terukur.

Keterkaitan antara infrastruktur mutu dan SDGs ke-17 bukan hanya sekedar retrorika. SDGs ke-17 menekankan kemitraan global yang diwujudkan melalui harmonisasi standar antarnegara, sebagaimana yang tertuang dalam *Roadmap of ASEAN Harmonised Standard to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation* yang menjadi salah satu *Priority Economic Deliverables* dalam ketentuan ASEAN Indonesia. Dalam lingkup yang luas, poin ke-17 menekankan peran negara dalam membangun sistem pembiayaan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi esensial bagi pembiayaan pembangunan (Firmansyah, A. & Wibowo, P., 2025).

Namun, terdapat kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dan realisasi target SDGs. Meskipun indeks IMN Indonesia membanggakan, pemanfaatannya bagi perlindungan konsumen dan daya saing produk belum optimal (BSN, 2024). Pengimplementasian anggaran berbasis kinerja masih memerlukan penyelarasan antara perencanaan strategis dan alokasi anggaran yang terukur (Ummam A. N. R. N., et al, 2023). Selain itu, Pemerintah provinsi di Indonesia menemukan bahwa SDGs ke-17 tentang kemitraan menempati posisi ketiga (90%). Namun, perlu digaribawahi standardisasi pelaporan dan penguatan kapasitas kelembagaan, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur (Syarifah, A. & Baroroh, N., 2023).

Dengan demikian, sinergi perencanaan anggaran Direktorat Standardisasi bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut kemampuan lembaga untuk mengartikulasikan kontribusinya terhadap infrastruktur mutu nasional dalam bingkai pencapaian SDGs ke-17. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan literatur dengan menganalisis bagaimana kualitas perencanaan anggaran Direktorat Standardisasi dapat memperkuat infrastruktur mutu nasional sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan kemitraan global dalam SDGs ke-17. Melalui pendekatan ini, diharapkan tersedia rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong efektivitas dan akuntabilitas penganggaran standardisasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi literatur (*library research*). Melalui pendekatan studi literatur, penelitian kualitatif deskriptif ini berupaya memaparkan realitas secara objektif tanpa melakukan pengujian kausalitas (Febrianto & Siroj, 2024). Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam terkait sinergi perencanaan anggaran dalam memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional serta kontribusinya terhadap pencapaian SDGs ke-17. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kebijakan publik secara komprehensif, khususnya yang bertujuan dengan proses perencanaan, pengelolaan anggaran, dan capaian kinerja organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Analisis diarahkan pada upaya Direktorat Standardisasi dalam memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional dalam kerangka pencapaian SDGs ke-17 serta menjadi fondasi strategis bagi daya saing bangsa di pasar global.

Analisis dilakukan menggunakan data sekunder berbasis kepustakaan yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi SINTA dan terindeks Scopus. Ruang lingkup data mencakup literatur indikator kinerja, capaian program, serta realisasi anggaran dalam memperkuat Infrastruktur

Mutu Nasional (IMN) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Data sekunder mencakup dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu tahun 2025, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menerapkan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Tahapan diawali dengan mengidentifikasi masalah yang dilanjutkan dengan seleksi literatur secara selektif untuk menjamin kualitas referensi. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap artikel terpilih guna membangun teori yang relevan dan kokoh bagi penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi data (*content analysis*) melalui model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, data disintesis dengan memilih info penting dan mengeliminasi poin yang kurang relevan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan secara sistematis melalui narasi deskriptif guna memperjelas pola hubungan antar-konsep perencanaan anggaran dalam memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional untuk mencapai target SDGs ke-17. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan secara induktif dan komparatif untuk menghasilkan keterkaitan antara perencanaan anggaran dan capaian program bagi konteks Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Sebagai unit kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PKTN), direktorat standardisasi memegang peran krusial dalam memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional (IMN). Berdasarkan Laporan Kinerja (LAPKIN) 2025, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencatatkan performa yang positif.

Tabel. 1 Indeks Kendali Mutu Tahun 2025

Indeks Kendali Mutu Tahun 2025					
Indikator Kinerja Strategis	Target 2025 (%)	Prediksi Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Kendali Mutu	70	100,00	75,59	107,98	Melampaui target
Persentase eksportir yang tertelusur mutunya	37	100,00	48,15	130,13	Melampaui target
Persentase LSPro yang memenuhi ketentuan	100	100,00	100,00	100,00	Sesuai target
Persentase laboratorium penguji BPSMB nilai uji profisiensinya memuaskan	79	100,00	84,30	106,71	Melampaui target

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Berdasarkan data tabel diatas, Indeks Kendali Mutu mencapai angka 75,59% atau setara dengan 107,98% dari target awal. Pencapaian yang melampaui target ini mengindikasikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk peningkatan kerja sama internasional di bidang standardisasi dan pengendalian mutu, penguatan sistem pengawasan barang beredar, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Realisasi Anggaran Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Perencanaan Anggaran pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Tahun 2025 tercermin dalam dokumen RKA-K/L yang menunjukkan total alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp15,88 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas mutu nasional, serta penguatan kerja sama global. Salah satu komponen penting dalam alokasi anggaran adalah kegiatan kerja sama internasional, seperti partisipasi dalam forum standardisasi global (*Hybrid Meeting Sidang JSC EEE 39*), yang didukung oleh anggaran perjalanan dinas luar negeri serta komponen kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah mengakomodasi kebutuhan strategis dalam memperluas jaringan kemitraan internasional.

Tabel. 2 Realisasi Anggaran Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Standardisasi dan Pengendalian Mutu				
Pagu Awal	Pagu Revisi (Nonblokir)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Capaian Terhadap Pagu Tersedia
Rp 15.886.000.000	Rp9.457.563	Rp.418.039.486	59,29	99,58

Sumber: Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (2025)

Berdasarkan data realisasi anggaran di atas, tingkat penyerapan anggaran terhadap pagu nonblokir mencapai 99,58% menunjukkan pelaksana program yang sangat efisien dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Meski demikian, perencanaan anggaran yang ada masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi lintas program. Sejumlah kegiatan masih bersifat sektoral belum sepenuhnya menyatu dalam kerangka besar penguatan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arah perencanaan telah sejalan dengan tujuan strategis, penguatan sinergi antarprogram tetap menjadi kebutuhan mendesak guna mengoptimalkan dampak nyata di lapangan.

Pola Sinergi Perencanaan Anggaran Direktorat Standardisasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Direktorat Standardisasi harus selaras dengan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) yang berlaku di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta *outcome* dari penggunaan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja pada K/L wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan visi, misi, serta tujuan organisasi mereka.

Dalam konteks Direktorat Standardisasi, sinergi perencanaan anggaran tercermin melalui keselarasan antara program perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengembangan komite teknis dan penguatan kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), tantangan nyata dalam sinergi anggaran terlihat pada integrasi komite teknis di lembaga riset pemerintah. Pasca pemotongan anggaran, pusat riset kesulitan membiayai pengelolaan Komite Teknis dan perumusan SNI, yang akhirnya menghambat produktivitas standar secara signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa fragmentasi anggaran antar unit merupakan hambatan struktural yang memerlukan solusi integrasi yang kuat (Ramadana *et al.*, 2023).

Untuk mengatasi hal tersebut, Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dari Kementerian Keuangan dan Bappenas menjadi instrumen kunci. Melalui prinsip *money follow program*, RSPP memperkuat penganggaran berbasis kinerja agar dokumen anggaran lebih transparan dan hasilnya lebih terukur. Hal ini memudahkan pimpinan dalam melakukan

monitoring dan evaluasi, sekaligus meningkatkan efisiensi serta efektivitas anggaran pemerintah.

Kontribusi Direktorat Standardisasi terhadap Penguatan Infrastruktur Mutu Nasional

Penguatan infrastruktur mutu yang didukung oleh perencanaan anggaran yang strategis menghasilkan capaian yang terukur dan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Standardisasi berpengaruh terhadap 21,2% dari pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan 14,5% dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia dengan 1% dalam jumlah standar yang ditetapkan berkorelasi dengan 0,16 dalam produktivitas tenaga kerja (Centre for Economics and Business Research/Cebr, 2023).

Berdasarkan data *Global Quality Infrastructure Index* (GQII) 2024, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-27 dari 185 negara. Capaian ini didukung oleh investasi anggaran yang konsisten pada tiga pilar utama, yaitu metrologi (peringkat ke-38), standardisasi (peringkat ke-37), dan akreditasi yang unggul di posisi ke-10 dunia. Meskipun menunjukkan prestasi global, manfaat infrastruktur mutu ini belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan industri. Masih terdapat celah antara kemampuan teknis yang ada dengan realisasi di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga sangat diperlukan agar modalitas ini bisa lebih efektif dalam melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penyusunan rancangan SNI, Spesifikasi Teknis (ST) atau Pedoman Tata Cara (PTC), penetapan regulasi dan pengawasan produk ber-SNI, pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), serta peningkatan kerja sama standardisasi Industri. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada alokasi anggaran yang tidak hanya memadai secara jumlah, tetapi juga dikelola secara terstruktur agar tercipta sinergi yang kuat antara perumusan, penerapan, hingga pengawasan standar.

Hambatan Struktural dalam Sinergi Perencanaan Anggaran Standardisasi

Berdasarkan analisis dokumen LAPKIN dan RKA-K/L, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu telah menunjukkan upaya sinkronisasi antara perencanaan program dengan alokasi anggaran, yang tercermin dari keselarasan indikator kinerja yang ditetapkan. Namun, hal tersebut masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek koordinasi antarunit dan integrasi lintas sektor. Adanya program yang masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka kebijakan terpadu berpotensi mendegradasi dampak penguatan sistem mutu secara holistik.

Implementasi anggaran berbasis kinerja di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) masih menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu pola pikir keliru di mana masih ada anggapan bahwa anggaran harus selalu naik setiap tahun. Adanya kecenderungan instansi untuk mengajukan anggaran sebesar-besarnya meskipun sering berujung pada pemotongan. Pengetahuan penyusun anggaran dan pimpinan unit kerja mengenai konsep anggaran berbasis kinerja masih rendah (Ummam *et al.*, 2023).

Khusus Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu terdapat tantangan tambahan. Hasil kerja di bidang ini bersifat jangka panjang dan sulit diukur hanya dalam satu tahun anggaran. Selain itu, penggunaan Standar Biaya Masukan (SBM) belum optimal karena keterbatasan pemahaman pegawai terhadap aturan serta adanya perbedaan persepsi, meski di beberapa unit hal ini terbukti meningkatkan efisiensi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinergi melalui penggunaan data yang akurat dan terintegrasi dalam perencanaan. Sistem informasi yang handal menjadi dasar penting untuk menentukan prioritas program dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien (Pratiwi & Nugroho, 2024).

Sinergi Perencanaan Anggaran Standardisasi dan SDGs Ke-17

SDGs 17 menegaskan bahwa penguatan kapasitas lembaga dan sumber daya keuangan adalah kunci utama pembangunan. Karena tidak ada institusi yang bisa bergerak sendiri, kerja sama lintas sektor menjadi sangat penting. Kemitraan multi-pihak yang sistematis terbukti efektif dalam mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan, dengan kunci keberhasilan terletak pada kemampuan membangun sinergi lintas sektor yang sistematis (Hidayat *et al.*, 2026).

Berdasarkan data RKA-K/L, terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan kerja sama internasional, yang menunjukkan adanya komitmen dalam memperkuat kemitraan global. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan posisi Indonesia dalam forum internasional, tetapi juga membuka peluang untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan standar mutu global. Namun demikian, kontribusi terhadap SDGs ke-17 tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan kerja sama, tetapi juga oleh kualitas dan keberlanjutan kemitraan yang dibangun kemampuan membangun sinergi lintas sektor yang sistematis.

Keterkaitan antara penganggaran standardisasi dengan SDGs ke-17 terwujud dalam tiga dimensi utama yang saling terintegrasi. Pertama, dimensi transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui anggaran Direktorat Standardisasi, Indonesia mampu mendanai partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional seperti ISO, IEC, dan Codex. Langkah ini membuka akses langsung terhadap teknologi dan praktik terbaik global. Sebagaimana tercermin dalam Festival Infrastruktur Mutu Nasional 2023, tema "Sinergi Metrologi, Standar, dan Akreditasi untuk Peningkatan Daya Saing Indonesia" menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekosistem mutu yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Kedua, dimensi kemitraan perdagangan. Perencanaan anggaran yang terarah memungkinkan terjadinya harmonisasi standar yang mendorong perdagangan internasional menjadi lebih adil dan inklusif. Melalui kolaborasi lintas sektor, Indonesia tidak hanya fokus pada target pembangunan domestik, tetapi juga berkontribusi aktif pada keberhasilan agenda global SDGs melalui solusi-solusi yang inovatif dan berdampak luas (Rahman *et al.*, 2023). Ketiga, dimensi peningkatan kapasitas (*capacity building*). Alokasi anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi standar secara langsung memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam ekosistem infrastruktur mutu. Penguatan ini menjadi langkah strategis untuk memenuhi kriteria keanggotaan organisasi ekonomi internasional yang mewajibkan adanya harmonisasi standar serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang menyeluruh.

Model Integrasi Anggaran Standardisasi untuk Mendukung SDGs Ke-17

Berdasarkan temuan diatas, model integrasi yang ideal memerlukan 4 elemen kunci. Pertama, perencanaan berbasis *outcome* yang jelas dengan indikator kinerja yang terhubung langsung pada capaian mutu dan target SDGs. Dengan implementasi penganggaran berbasis kinerja yang efektif menekankan bahwa *outcome* program tercermin dalam dari hasil kinerja yang ingin dicapai secara nasional dan setiap satuan kerja menyusun anggaran wajib memperhatikan faktor efisiensi sekaligus dampak jangka panjang yang ingin diwujudkan.

Kedua, dengan tujuan supaya tidak terjadi duplikasi kegiatan maupun kesenjangan pembiayaan yang menghambat fungsi komponen mutu secara keseluruhan diperlukan sinergi anggaran antar pilar infrastruktur mutu yang mencakup standardisasi, metrologi dan akreditasi. Penguatan infrastruktur mutu memerlukan kolaborasi aktif antara pihak internasional dengan berbagai praktik terbaik dalam pengembangan infrastruktur mutu nasional.

Ketiga, integrasi sistem dilakukan melalui mekanisme KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sistem ini secara otomatis menghubungkan rencana kerja

Direktorat Standardisasi dengan target RPJMN serta sasaran SDGs. Hal ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan dapat diterjemahkan secara konsisten menjadi program dan kegiatan anggaran yang terukur serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, dilakukan evaluasi berkala yang melampaui sekadar penilaian penyerapan anggaran. Evaluasi ini fokus pada dampak nyata standardisasi terhadap daya saing, keselamatan konsumen, dan kontribusi dalam kemitraan global. Upaya standardisasi ini terus berperan dalam melindungi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, hingga masyarakat luas, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Integrasi Temuan: Sinergi yang Holistik dan Berkelanjutan

Berdasarkan analisis tersebut, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dinilai telah mengelola anggaran dan menjalankan program dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari capaian indikator yang melampaui target serta penyerapan anggaran yang maksimal. Meski demikian, ada empat langkah yang perlu diambil untuk memperkuat sinergi perencanaan anggaran ke depan, yaitu mengintegrasikan perencanaan antarprogram, memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah duplikasi, memaksimalkan penggunaan data dalam menyusun rencana, serta memperdalam evaluasi berbasis dampak atau outcome (Chen *et al.*, 2024; Anderson & Lee, 2023).

Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan perencanaan anggaran dapat lebih optimal dalam memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional dan mendukung target SDGs ke-17. Melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data, alokasi anggaran diharapkan mampu memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan, selaras dengan amanat RPJMN serta komitmen global SDGs 2030 (Wahyuni, 2024; Miles *et al.*, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sinergi perencanaan anggaran pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu memegang peranan vital dalam memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) guna mendukung pencapaian SDGs ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat telah mencapai kinerja yang sangat positif, terlihat dari Indeks Kendali Mutu yang melampaui target (107,98%) dan penyerapan anggaran yang sangat efisien mencapai 99,58% dari pagu tersedia. Capaian ini membuktikan bahwa alokasi anggaran yang diarahkan pada standardisasi, metrologi, dan akreditasi mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan PDB nasional.

Secara teoretis, implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) telah menjadi instrumen kunci dalam menggeser pola anggaran tradisional menuju penganggaran yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Kontribusi terhadap SDGs ke-17 terwujud melalui dimensi transfer teknologi dalam forum internasional (seperti ISO dan IEC), harmonisasi standar untuk kemitraan perdagangan yang adil, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Sebagai rekomendasi, Direktorat Standardisasi perlu terus memperkuat integrasi perencanaan lintas program untuk meminimalisir fragmentasi anggaran antar unit. Diperlukan optimalisasi penggunaan sistem informasi berbasis data (seperti KRISNA) guna memastikan prioritas program selaras dengan target jangka panjang RPJMN 2025-2029. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji dampak ekonomi dan sosial penerapan standar pada IKM, guna melengkapi analisis efektivitas anggaran dari sudut pandang penerima layanan.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, J. E., & Lee, K. (2023). Public budgeting and performance management in developing countries. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 245–260. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac010>
- Badan Standardisasi Nasional. (2022). Urgensi sinergi dan kolaborasi standarisasi nasional dengan kebijakan riset dan inovasi. BSN. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/12965>
- Badan Standardisasi Nasional. (2023). Sinergi pembangunan infrastruktur mutu melalui Festival Infrastruktur Mutu Nasional 2023. BSN. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/17669>
- Badan Standardisasi Nasional. (2024). Penguatan infrastruktur mutu untuk Indonesia maju: Infrastruktur mutu Indonesia terdepan di ASEAN. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/21497>
- Badan Standardisasi Nasional. (2024a). Festival Infrastruktur Mutu Nasional 2024: Penguatan infrastruktur mutu untuk Indonesia maju. BSN. <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/21501>
- Badan Standardisasi Nasional. (2024b). Kemenko Perekonomian dukung pemanfaatan modalitas infrastruktur mutu nasional. BSN. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/22616>
- Badan Standardisasi Nasional. (2024c). Perlindungan konsumen dengan memanfaatkan modalitas infrastruktur mutu nasional. BSN. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/23635>
- Badan Standardisasi Nasional. (2024d). SNI Award 2024 ajak pelaku usaha tingkatkan performa dengan standarisasi. BSN. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/19316>
- Centre for Economics and Business Research. (2023). The economic impact of standards in Indonesia. ISO/Cebr. <https://www.iso.org/publication/PUB100491.html>
- Chen, L., Zhang, Y., & Huang, M. (2024). Performance-based budgeting and public sector efficiency: Evidence from emerging economies. *Public Finance Review*, 52(1), 88–110. <https://doi.org/10.1177/10911421231175432>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2024). Capaian output sebagai implementasi penganggaran berbasis kinerja. KPPN Palu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2999>
- Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. (2025). Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Firmansyah, A. (2023). Efektivitas pelaksanaan penganggaran dengan indikator standar biaya pada pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. *Jurnalku*, 3(1). <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.375>
- Hickmann, T., Biermann, F., S nit, C. A., Beisheim, M., Bernstein, S., Chasek, P., Grob, L., Kim, R. E., Kotz , L. J., Nilsson, M., Obermaier, M., Okereke, C., Pradhan, P., Raven, R., Sack, F., Stevance, A., & van Vuuren, D. (2024). Scoping article: Research frontiers on the governance of the Sustainable Development Goals. *Global Sustainability*, 7, e5. <https://doi.org/10.1017/sus.2024.4>
- Hidayat, N., Ibra, T., Parameswari, I. A. A. (2026). Peran United in Diversity (UID) sebagai NGO dalam mewujudkan SDGs 17: Partnerships for the goals melalui kolaborasi lintas sektor di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 7(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol7/iss2/6/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Kementerian Keuangan RI
- Kementerian Perindustrian RI — BSKJI. (2024). Menperin: Standardisasi dan layanan jasa industri ungu kit daya saing. BBSPJI Tekstil. <https://bbt.kemenperin.go.id/blog/menperin->

- [standardisasi-dan-layanan-jasa-industri-ungkit-daya-saing](#)
- Mais, R. G., Hendra, L., & Fathurrochman, G. (2024). Kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran: Implementasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1601–1611. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2018>
- Mesopartner & Analyticar. (2024). Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2024. Mesopartner. <https://gqii.org>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pratiwi, D., & Nugroho, R. (2024). Analisis penganggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 45–60.
- Rahman, A., Suryanto, D., & Putri, N. (2023). Policy implementation and budget planning in public sector organizations. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(2), 123–135. <https://doi.org/10.22146/jkap.75234>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmانيar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Syarifah, A., & Baroroh, N. (2023). Pengujian kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(2).
- Ummam, A. M. N. R. N., Qodarina, N., Siregar, P. I. R., & Firmansyah, A. (2023). Kendala dan kelemahan sistem penganggaran berbasis kinerja sektor publik: Suatu tinjauan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 63–71. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.378>
- United Nations. (2023). The Sustainable Development Goals report 2023: Special edition. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/goals/goal17>
- Wahyuni, S. (2024). Studi dokumen dalam penelitian kebijakan publik: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 21(1), 67–80.